

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah dkk. 2019. *Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*. Bandung: Nusamedia.
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agussalim Andi Gadjong. 2007. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ana Nadia Abrar. 2005. *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arfa'I. 2022. *Negara Hukum Pancasila*. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia.
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H. Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta; UII Press.
- Jimlly Ashiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan II, Proses dan Teknik pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moh Mahfud MD. 2010. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Renaka Cipta.
- Munir Fuady. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nandang Sudrajat. 2013. *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Philippus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pegadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.

Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----- 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Sukanto Satoto. 2004. *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.

B. Jurnal

Afif Syarief, “Model Pengelolaan Pertambangan Batubara Berbasis Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat di Kabupaten Bungo”, *Jurnal Sains Sosio Huaniora* Volume 3 Nomor 1 Juni 2019, LPPM Universitas Jambi, 2019.

Ahmad Ridli Gazali, “Kewenangan Daerah dalam Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi*, 2024.

Apriadi Bahri, Rizki, “Pengaturan pengelolaan pertambangan batubara dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia”, *S2 Thesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi*, 2021.

Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012.

Hasan Basri, “Kewenangan Kepala Daerah dalam Menentukan Formasi Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Sistem Kepegawaian Di Indonesia”. *Jurnal Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Iqbal Shalihin, “Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018.

Kristian Hido, “Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU NO 3 Tahun 2020”, *E-Journal UNSRAT*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2022.

RA. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal SOSFILKOM*, Volume XIII Nomor 01 Januari-Juni 2019, FISIP UMC, 2019.

Randa Septia Putra, “Implikasi hapusnya kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan pertambangan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia”, *S2 Thesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, 2024.

Siti Kotijah, “Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan Di Kota Samarinda”, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, *Jurnal Yuridika*: Volume 27 No 1, Januari-April 2012.

Sukamto Satoto dan Bahder Johan Nasution, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, LPPM Universitas Jambi, *Jurnal Sains Sosio Huaniora* P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019.

C. Kamus

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*. Depdiknas. Jakarta.

D. Artikel Internet

Bapenda Jabarprov, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, diakses melalui https://Bapenda.Jabarprov.Go.Id/Jdih/Undang-Undang/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_23_Tahun_2014.pdf, tanggal akses 15 Januari 2024.

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan, “Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”, Badan Pemeriksa Keuangan, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177410/pp-no-96-tahun-2021>, tanggal akses 15 Januari 2024.

H.K Martono, *Pengertian Perspektif atau sudut pandang*, diakses melalui <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang>, tanggal akses 23 Agustus 2023.

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, “Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”, diakses melalui https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf, tanggal akses 15 Januari 2024.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan”, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>, tanggal akses 16 Januari 2024.

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, *Sejarah Pengaturan Pertambangan Minerba dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*, diakses melalui <https://pushep.or.id/category/publikasi>, tanggal akses 12 Februari 2021.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

-----*Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. UU Nomor 4 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

-----*Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 22 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

-----*Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 32 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

- Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Nomor 4 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.*
- Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. UU Nomor 3 Tahun 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525*
- Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP Nomor 23 Tahun 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142.*
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Sumur Tua. PERMEN ESDM Nomor 01 Tahun 2008.*